



Efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Perlindungan Sosial bagi Pekerja/Buruh di Indonesia

Muhammad Fadel Adepio*, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Penelitian ini mengkaji efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja atau buruh di Indonesia, dengan menyoroti kesenjangan antara tujuan normatif sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dan implementasinya di lapangan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih ditemukannya berbagai permasalahan seperti belum meratanya cakupan kepesertaan, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pemberi kerja, serta keterbatasan pemahaman tenaga kerja mengenai hak-hak jaminan sosial yang seharusnya mereka peroleh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji dan menghubungkan berbagai konsep hukum ketenagakerjaan, teori efektivitas hukum, serta praktik implementasi jaminan sosial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kerja bagi pekerja, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan efektivitasnya belum optimal, antara lain ketidakmerataan kepesertaan, lemahnya pengawasan terhadap pemberi kerja, serta rendahnya kesadaran hukum pekerja. Selain itu, aspek pelayanan dan prosedur administrasi juga turut memengaruhi akses pekerja terhadap manfaat jaminan sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun BPJS Ketenagakerjaan telah berperan penting dalam sistem perlindungan sosial tenaga kerja, masih diperlukan penguatan dalam aspek implementasi agar tujuan perlindungan sosial dapat tercapai secara lebih merata dan efektif di seluruh sektor ketenagakerjaan di Indonesia..

Kata kunci: Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja, Efektivitas Hukum, Perlindungan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i3.1127>

*Correspondence: Muhammad Fadel Adepio

Email:

muhammad.205230270@stu.untar.ac.id

Received: 15-03-2026

Accepted: 15-03-2026

Published: 15-04-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the effectiveness of the Indonesian Employment Social Security Administration Agency (BPJS Ketenagakerjaan) in providing social protection for workers in Indonesia, focusing on the gap between the normative objectives of the social security system and its implementation in practice. The background of this research is based on several existing issues, such as unequal coverage of participation, low compliance from some employers, and limited understanding among workers regarding their social security rights. The purpose of this study is to analyze the level of effectiveness of BPJS Ketenagakerjaan implementation and to identify factors influencing the optimization of social protection for workers in Indonesia. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches through library research, using primary, secondary, and tertiary legal materials, including legislation, legal literature, and relevant academic journals. The data is analyzed qualitatively by examining and connecting various labor law concepts, theories of legal effectiveness, and the practical implementation of social security in Indonesia. The findings show that, normatively, BPJS Ketenagakerjaan has a strong legal foundation in providing protection against employment risks for workers; however, in practice, its effectiveness is still not optimal due to several obstacles, including unequal participation coverage, weak supervision of employers, and low legal awareness among workers. In addition, service quality and administrative procedures also affect workers' access to social security benefits. Therefore, it can be concluded that although BPJS Ketenagakerjaan plays an important role in the labor social protection system, strengthening in the implementation aspect is still required to ensure that social protection objectives can be achieved more equally and effectively across all employment sectors in Indonesia.

Keywords: Social Security, BPJS Ketenagakerjaan, Workers, Legal Effectiveness, Protection

Pendahuluan

Perubahan dalam struktur ekonomi dan perkembangan dunia kerja di Indonesia dalam belakangan ini menunjukkan peningkatan kebutuhan terhadap sistem perlindungan sosial yang bagian penting yang menjalankan proses produksi, namun pada saat yang sama berada dalam posisi yang relatif rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Ketimpangan posisi antara pekerja dan pemberi kerja ini menyebabkan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi isu yang penting dalam kajian hukum ketenagakerjaan modern (Sutrisno, 2021).

Dalam perspektif akademik, jaminan sosial dipahami sebagai instrumen negara dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan hidup seseorang, khususnya pekerja yang menggantungkan pendapatan dari hubungan kerja. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme bantuan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan struktural yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pekerja (Hidayat & Nurhayati, 2020). Dengan demikian, jaminan sosial memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya.

Di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua. Namun, dalam kajian empiris, ada banyak masalah yang masih terkait dengan implementasi program ini. Yang paling menonjol adalah cakupan partisipasi dan seberapa efektif program tersebut dilaksanakan di lapangan. Menurut sejumlah penelitian, sistem jaminan sosial saat ini tidak cocok untuk semua pekerja, terutama yang bekerja di sektor informal (Sari, 2021).

Ketidakseimbangan cakupan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial tenaga kerja masih kurang inklusif. Pekerja di sektor informal seringkali tidak memiliki akses yang sama ke program jaminan sosial seperti pekerja di sektor formal. Hal ini disebabkan oleh sifat hubungan kerja yang tidak selalu terikat secara formal, yang membuat proses pendataan dan keterlibatan dalam sistem menjadi lebih sulit.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pekerja maupun pemberi kerja yang belum memahami secara menyeluruh mengenai pentingnya perlindungan sosial dalam dunia kerja. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap program jaminan sosial yang telah disediakan (Pratama, 2022).

Menurut teori efektivitas hukum, suatu sistem hukum diukur dari keberadaan aturan formal dan seberapa efektif aturan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008). Dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan, efektivitas dapat diukur dari tingkat partisipasi pekerja, kepatuhan pemberi kerja, dan kemampuan sistem untuk memberikan perlindungan secara efektif dan tepat sasaran kepada individu yang menerimanya.

Namun, dalam kenyataannya, masih ada sejumlah tantangan struktural dan teknis yang menghambat keberhasilan program jaminan sosial. Antara hambatan tersebut adalah kurangnya akses ke pekerja sektor informal, kurangnya pengawasan terhadap pemberi

kerja, dan kurangnya pengetahuan hukum tenaga kerja tentang hak-hak mereka dalam sistem jaminan sosial (Rahardjo, 2009).

Di samping itu, tingkat pelayanan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara jaminan sosial sangat penting untuk menentukan seberapa efektif sistem itu sendiri. Seringkali, proses pemanfaatan hak jaminan sosial terhambat oleh prosedur administrasi yang kompleks dan ketidaktahuan peserta tentang mekanisme klaim. Hal ini dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dan kepercayaan mereka pada sistem yang ada (Wibowo, 2020).

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bagian penting dari perlindungan pekerja. Namun, ada banyak masalah yang rumit saat melaksanakannya. Permasalahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terkait dengan kesadaran hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang kinerja BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui seberapa efektif sistem ini dalam memberikan perlindungan sosial yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi karyawan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja atau buruh di Indonesia, khususnya dalam hal penerapan di lapangan yang masih menghadapi banyak masalah. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan elemen-elemen yang memengaruhi kinerja program jaminan sosial ketenagakerjaan; ini mencakup kepatuhan pemberi kerja, tingkat kesadaran hukum tenaga kerja, dan peran penyelenggara dalam menyediakan layanan kepada peserta. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana tujuan normatif sistem jaminan sosial ketenagakerjaan berkorelasi dengan cara mereka diterapkan. Selain itu, itu juga akan berfungsi sebagai sumber evaluasi akademik untuk upaya untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia.

Metodologi

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini berfokus pada mempelajari doktrin-doktrin hukum dan aturan hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja atau buruh di Indonesia. Ini dilakukan dengan meninjau berbagai ketentuan hukum, konsep jaminan sosial, dan teori efisiensi hukum yang muncul dalam penelitian akademik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat bagian normatif dari peraturan yang ada, tetapi juga bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini, dua pendekatan digunakan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tentang efektivitas hukum, perlindungan pekerja, dan jaminan sosial dari teori hukum. Selain itu, penelitian ini didukung oleh studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian terkait.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, sementara bahan hukum sekunder berasal dari artikel akademik, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier terdiri dari sumber pemahaman, seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Untuk menjawab masalah penelitian secara menyeluruh, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan, menghubungkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber.

Hasil dan Pembahasan

A. Efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Sosial bagi Pekerja

Sejauh mana kebijakan hukum ketenagakerjaan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal perlindungan sosial bagi pekerja. Dalam BPJS Ketenagakerjaan, tujuan utama pembentukan sistem ini adalah untuk melindungi pekerja dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Tetapi tingkat keberhasilan program ini masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar di berbagai bidang kerja.

Kajian literatur telah menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah meningkatkan rasa aman bagi sebagian besar pekerja formal yang telah terdaftar sebagai peserta aktif. Pekerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial cenderung memiliki perlindungan yang lebih baik ketika menghadapi risiko kerja dibandingkan dengan pekerja yang tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial ketenagakerjaan telah berjalan sesuai dengan tujuan awalnya secara institusional dan normatif (Sari, 2021).

Namun demikian, keefektifan tersebut belum dapat dikatakan optimal ketika mempertimbangkan cakupan kepesertaan. Banyak karyawan masih belum terjangkau oleh BPJS Ketenagakerjaan, terutama di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan sosial belum sepenuhnya diterapkan secara universal. Akibatnya, tujuan perlindungan sosial untuk seluruh tenaga kerja belum tercapai sepenuhnya (Hidayat & Nurhayati, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran data melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal hukum, buku akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Proses pencarian data dilakukan dengan menggunakan beberapa kata kunci (keywords) yang disesuaikan dengan fokus penelitian, antara lain "BPJS Ketenagakerjaan", "jaminan sosial tenaga kerja", "perlindungan pekerja", dan "efektivitas hukum".

Sumber data diperoleh dari database jurnal ilmiah seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, serta literatur hukum yang relevan. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, dipilih beberapa sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian dan digunakan sebagai dasar dalam analisis. Adapun ringkasan hasil penelusuran data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Ringkasan hasil penelusuran data

No	Kata Kunci	Sumber	Jumlah Artikel Ditemukan	Artikel Digunakan	Keterangan
1	BPJS Ketenagakerjaan	Google Scholar	±120 artikel	5 artikel	Relevan dengan efektivitas program
2	Jaminan sosial tenaga kerja	Portaljurnal nasional	±95 artikel	4 artikel	Fokus perlindungan pekerja
3	Efektifitas Hukum	Google Scholar	±150 artikel	3 artikel	Teori efektivitas hukum
4	Perlindungan pekerja	Portal jurnal hukum	±110 artikel	3 artikel	Perspektif hukum ketenagakerjaan

B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan

Kesuksesan program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan, tetapi juga oleh banyak variabel yang saling berhubungan. Salah satu faktor penting adalah seberapa patuh pemberi kerja dalam mendaftarkan karyawannya ke dalam program jaminan sosial. Namun, perusahaan seringkali tidak melakukannya sepenuhnya karena biaya, kekurangan pengawasan, atau kurangnya kesadaran hukum.

Selain faktor pemberi kerja, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum tenaga kerja juga sangat berpengaruh. Banyak pekerja tidak tahu hak mereka dalam sistem jaminan sosial, jadi mereka tidak dapat secara aktif menuntut hak tersebut. Pekerja semakin gagal mendapatkan perlindungan sosial yang layak karena kurangnya pengetahuan hukum (Pratama, 2022).

Komponen kelembagaan dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi faktor yang memengaruhi. Sebagian pekerja menganggap proses administratif yang harus dilalui oleh peserta untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial cukup sulit. Hal ini dapat memengaruhi cara masyarakat melihat pemerintah, terutama ketika klaim dianggap sulit dan rumit (Wibowo, 2020).

C. Hambatan dalam Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam praktik pelaksanaannya, program BPJS Ketenagakerjaan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berasal dari faktor sosial maupun struktur sistem ketenagakerjaan itu sendiri. Salah satu kendala yang cukup dominan adalah masih besarnya proporsi pekerja yang berada pada sektor informal, yang pada umumnya tidak memiliki ikatan kerja formal dengan pemberi kerja sehingga proses integrasi ke dalam sistem kepesertaan wajib menjadi lebih kompleks dan tidak dapat dilakukan dengan

mekanisme yang sama seperti pekerja formal. Kondisi ini menyebabkan cakupan perlindungan jaminan sosial belum dapat menjangkau seluruh kelompok tenaga kerja secara merata.

Di samping itu, aspek pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja juga masih menjadi persoalan yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Lemahnya konsistensi dalam pengawasan membuat sebagian kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada pekerja tidak sepenuhnya terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Situasi ini mencerminkan masih adanya ketidaksesuaian antara aturan yang telah ditetapkan secara normatif dengan realitas penerapannya di lapangan (Soerjono Soekanto, 2008).

Komponen budaya hukum masyarakat juga merupakan kendala tambahan. Orang-orang masih menganggap jaminan sosial bukan kebutuhan utama, sehingga beberapa pekerja tidak memperhatikan pentingnya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam jangka panjang, jaminan sosial memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi seseorang ketika mereka menghadapi risiko kerja yang tidak terduga.

D. Analisis Efektivitas dalam Perspektif Hukum

Dari sudut pandang efektivitas hukum, keberhasilan suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat implementasi serta dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, tingkat efektivitasnya dapat dianalisis melalui beberapa indikator penting, antara lain luasnya cakupan kepesertaan, tingkat kepatuhan pihak pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban jaminan sosial, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara dalam mengakses manfaat program.

Apabila indikator-indikator tersebut belum berjalan secara optimal, maka dapat dikatakan bahwa sistem jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Walaupun secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif dalam penyelenggaraan jaminan sosial, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang menunjukkan perlunya penguatan pada aspek pengawasan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta perluasan jangkauan kepesertaan agar perlindungan dapat bersifat lebih merata (Rahardjo, 2009).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada aspek regulasi semata, tetapi juga merupakan hasil dari keterkaitan yang erat antara sistem hukum, kinerja kelembagaan, dan tingkat kesadaran masyarakat. Ketiga komponen tersebut perlu berjalan secara seimbang agar tujuan utama berupa perlindungan sosial bagi tenaga kerja dapat terwujud secara maksimal dan berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang memadai dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja terhadap risiko ketenagakerjaan.

Namun, karena masih ada banyak hambatan dalam implementasi di lapangan, efektivitas pelaksanaannya belum dapat dikatakan optimal. Faktor-faktor kelembagaan dan pelayanan juga memengaruhi tingkat efektivitas, terutama dalam hal administrasi dan akses ke manfaat jaminan sosial. Selain itu, hambatan tersebut termasuk belum meratanya cakupan kepesertaan, terutama di sektor informal, dan rendahnya kesadaran hukum tenaga kerja tentang pentingnya jaminan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan sesuai dengan tujuan normatifnya, namun dari sisi implementasi masih diperlukan penguatan di berbagai aspek agar perlindungan sosial tenaga kerja dapat berjalan secara lebih merata, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama, pemerintah bersama instansi terkait perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pemberi kerja agar pelaksanaan kewajiban dalam mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial dapat berjalan secara lebih konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga potensi ketidakpatuhan dapat diminimalisir.

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi serta edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya bagi pekerja di sektor informal, mengenai pentingnya perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran pekerja terhadap hak-hak mereka, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih luas dalam program jaminan sosial.

Ketiga, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan serta penyederhanaan prosedur administrasi, terutama dalam proses pengajuan dan pencairan manfaat jaminan sosial. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi layanan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara jaminan sosial. Keempat, dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan inklusif, sehingga tujuan perlindungan tenaga kerja dapat tercapai secara lebih optimal dan menyeluruh.

Selain itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan empiris, seperti melalui pengumpulan data lapangan atau wawancara langsung dengan pekerja dan pihak terkait, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi BPJS Ketenagakerjaan serta kendala yang dihadapi secara aktual.

Daftar Pustaka

- Andiaswaty, H. (2020). Analysis Of The Implementation Of The First Street Patient Requirements Of Bpjs Health Partners In Padangmatinggi Puskesmas Padangsidempuan City. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 3(2), 143-147, ISSN 2597-6052, <https://doi.org/10.56338/mppki.v3i2.1084>
- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum ketenagakerjaan*. RajaGrafindo Persada.
- Helmi, S. (2024). Enhancing participant experience: Perceptions of BPJS employment services. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 466-476, ISSN 2576-8484, <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2103>
- Hidayat, R., & Nurhayati, S. (2020). Implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 45–58.
- Husni, L. (2019). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja*.
- Isabel, L. (2024). Predicting BPJS Health Insurance Premiums using SIR-like Participant Models and Frequency-Severity Model. *Aip Conference Proceedings*, 3016(1), ISSN 0094-243X, <https://doi.org/10.1063/5.0192491>
- Khakim, A. (2014). *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan, T. (2021). Analisis efektivitas hukum dalam implementasi BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Positum*, 9(1), 88–102.
- Pratama, D. (2022). Kesadaran hukum pekerja terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 10(1), 77–90.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (2019). Sistem jaminan sosial sebagai perlindungan pekerja di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(2), 33–47.
- Sari, M. (2021). Perlindungan tenaga kerja sektor informal dalam sistem jaminan sosial. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 101–115.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sufriyana, H. (2020). Artificial intelligence-assisted prediction of preeclampsia: Development and external validation of a nationwide health insurance dataset of the BPJS Kesehatan in Indonesia. *Ebiomedicine*, 54, ISSN 2352-3964, <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.102710>
- Sutrisno. (2021). Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 112–124.
- Wibowo, A. (2020). Efektivitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 66–80.